

Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Bella Gita Sabono, Amrie Firmansyah

^{1,2)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia
inbedetefal@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Januari 2024

Disetujui : 6 Februari 2024

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh infrastruktur sektor pariwisata dan kebudayaan, infrastruktur perumahan dan fasilitas umum dan ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah pada tahun 2017 hingga 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku dan laporan APBD yang dipublikasikan di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur sektor pariwisata dan budaya terhadap kemandirian daerah mempunyai pengaruh negatif, begitu juga dengan ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian daerah mempunyai pengaruh negatif. Sedangkan infrastruktur sektor perumahan dan fasilitas umum memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Keywords: Infrastruktur, Sektor Pariwisata dan Budaya, Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pemberlakuan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi kesempatan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga penerimaan daerah dapat optimal. Penyusunan penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan , Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sehingga Pembangunan daerah dapat dibiayai oleh penerimaan tersebut.

Dalam mengukur kemandirian keuangan daerah maka hal paling penting yaitu peranan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD, semakin besar peranan PAD maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin

kecil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan baru ada 20 daerah mandiri di seluruh Indonesia yang tidak tergantung anggaran dari pemerintah pusat. Sebanyak 20 daerah itu terdiri dari 14 provinsi, 5 kota dan 1 kabupaten yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Bandung (Kemendagri,2022). Hal ini menunjukkan bahwa Maluku belum dikatakan mandiri. Hal ini terlihat juga pada kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2021 hingga tahun 2022 berkisar antara 17 sampai 21 persen, sehingga tingkat kemandirian Provinsi Maluku pada tahun-tahun tersebut dikategorikan rendah sekali.

Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari 9 Kabupaten yaitu Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan 2 Kota yaitu Ambon dan Tual. Realisasi pendapatan dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sangat berfluktuatif. Rasio kemandirian daerah di tahun 2022 bahwa beberapa kabupaten dapat dikatakan sudah dapat mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapat daerah tetapi beberapa kabupaten yang belum mencapai 50% dalam mengelola pendapatan daerah sehingga dapat dikatakan belum dapat mandiri dalam mengelola pemerintahan daerah, sedangkan pemerintah daerah dituntut untuk menjadi promotor dalam menggerakkan perekonomian daerah masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah harus sangat diperhatikan agar dapat menciptakan sumber pendapatan untuk daerahnya sendiri. Seluruh daerah Provinsi Maluku memiliki banyak sekali daerah wisata yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya dengan menganggarkan belanja infrastruktur pariwisata dan budaya untuk membangun infrastruktur di setiap tempat wisata. Infrastruktur pariwisata dan budaya akan menciptakan tempat wisata serta budaya dari suatu daerah menjadi lebih menarik untuk diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat dalam daerah maupun luar daerah. Hal ini akan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah.

Kemandirian daerah juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam suatu daerah. Salah satu wujud kesejahteraan yang dirasakan masyarakat yaitu ketersediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu dan fasilitas umum. Belanja infrastruktur perumahan dan fasilitas umum sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas masyarakat. Apabila pembangunan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum diperhatikan dengan baik maka seluruh aktivitas-aktivitas masyarakat akan berjalan dengan baik dan akan berdampak bagi pendapatan daerah.

Kemandirian daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan daerah khususnya di bidang infrastruktur karena infrastruktur merupakan salah satu aspek penting atau prioritas untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga mempunyai peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Hal ini disebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Menurut pengukuran IKF, bila nilai berada di kisaran 0 sampai dibawah 0,25, maka provinsi tersebut masuk kategori belum mandiri. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2020, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku memiliki nilai IKF dibawah 0,25 (BPK RI, 2020). Oleh karena itu diharapkan pengelolaan yang baik terhadap sumber-sumber kekayaan alam tersebut yang akan mempengaruhi pendapatan daerah. Ulasan atas mengenai seberapa jauh pengelolaan infrastruktur untuk mengelola sektor-sektor penghasil pendapatan daerah menjadi isu menarik untuk diulas, sehingga penelitian atas pengujian pengaruh yaitu sektor pariwisata dan budaya juga sektor perumahan dan fasilitas umum terhadap kemandirian daerah perlu diinvestigasi.

Literatur sebelumnya yang telah menguji kemandirian daerah diantaranya dilakukan dengan sektor infrastruktur (Hamzah & Setiawan,2019; Putra,2019; Dewi, Indrawati, & Septiani,2020; M. Harefa,2020; Asima, dkk (2023), sektor pariwisata (F.U. Zakiah,2019; Kristianti & Bala, 2019; Anggreini, dkk, 2022; Sunandar, Jannah, & Raya,2023), sektor

perdagangan (A.D. Wahyuningtias,2021; Diah & Heny, 2021) sektor transportasi dan komunikasi (V. Anastasya et al, 2021), sektor perumahan dan fasilitas umum (Arrfah A.P & Syafri, 2022; Aprillia & Amar, 2023) Ukuran Pemerintah Daerah (Rofiq & Arza,2021). Penelitian-penelitian tersebut menguji infrastruktur dalam satu pemerintah daerah. Terdapat adanya konsistensi dari penelitian sebelumnya yang membuat penelitian ini menjadi perlu dilakukan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh infratraktur di sektor pariwisata dan budaya, sektor perumahan dan fasilitas umum, ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2022. Pada penelitian sebelumnya pengujian terhadap kemandirian daerah belum pernah menggunakan ukuran pemerintah daerah. Pada penelitian sebelumnya ukuran daerah dipakai untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian sebelumnya juga tidak menggabungkan ketiga proksi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pengukur kemandirian daerah, serta lokasi penelitian yang membahas kemandirian daerah belum pernah dilakukan belum pernah menggunakan lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pengujian ini dilakukan di Maluku terkenal dengan julukan “Kepulauan Rempah” selain itu juga memiliki alam yang indah dan berbagai budaya sehingga sebagaian besar daerah di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku memperhatikan infrastruktur sebagai wadah pengelola dan penghasil pendapatan daerah untuk kemajuan kemandirian daerah masing-masing. Selain itu, pengujian terhadap infrstruktur di sektor pariwisata dan budaya, sektor perumahan dan fasilitas umum, dan ukuran pemerintah daerah masih jarang digunakan dalam pengujian terhadap kemandirian daerah.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan literatur dalam bidang perencanaan, infrastruktur wilayah, dan akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur terkait dengan kemandirian daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk arah pengembangan kebijakan kawasan khusus dalam mendorong kemandirian daerah terutama dalam hal Pembangunan demi meningkatkan perekonomian.

STUDI LITERATUR

Pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan kemandirian daerah yang kuat maka seluruh fokus pengelolaan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dimana salah satu upaya pemerintah bertanggung jawab untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan infrastruktur pada daerah. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal capital) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah (Mankiw,2015:361). Infrastruktur didefinisikan sebagai seluruh struktur dan fasilitas-fasilitas fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah, perorangan maupun perusahaan guna memenuhi kebutuhan atau keperluan masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.

Infrastruktur terdiri dari infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dari infrastruktur sosial yang jika diperhatikan dan dikelola dengan baik akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi suatu daerah. Secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Maluku terkenal dengan alam yang indah, pantainya yang masih asli serta kehidupan lautnya yang unik sehingga banyak dijadikan rekomendasi bagi wisatawan untuk mengunjungi setiap daerah di Provinsi Maluku.

Menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisata , pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Infrastruktur pariwisata di suatu daerah dilihat berdasarkan jenis-jenis usaha yang ada di daerah tersebut. Jenis-jenis usaha di sektor pariwisata yaitu penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, kawasan pariwisata. Usaha di sektor pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan harus tetap memperhatikan asas-asas pembangunan nasional.

Menurut penelitian Diah & Heny (2021), Sunandar et al (2023) menemukan bahwa infrastruktur sektor pariwisata dan budaya berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pemerintah jika serius memperhatikan sektor pariwisata di daerahnya maka akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerahnya. Bentuk dari keseriusan pemerintah daerah terhadap sektor wisata dengan menyediakan belanja fungsi khusus untuk sektor pariwisata dan budaya, terkhususnya pembangunan infrastruktur untuk sektor tersebut. pembangunan infrastruktur tersebut yang nantinya akan berfungsi sebagai wadah untuk pengelolaan sektor pariwisata dan budaya sehingga dapat meningkatkan pendapatann daerah.

H1 : Infrastruktur sektor pariwisata dan budaya berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Anggaran publik dialokasi perumahan dan infrastruktur umum akan dirasakan manfaatnya secara langsung. Terkhususnya masyarakat yang mempunyai status ekonomi menengah kebawah akan mendapatkan rumah yang layak dan fasilitas umum sehingga akan mempengaruhi aktivitas produksi sehingga perkembangan kemandirian daerah akan semakin meningkat.

Menurut penelitian Arrfah & Syafri (2023) belanja pemerintah terhadap fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah sebagai wujud kemandirian daerah kedepan tidak hanya memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pembangunan infrastruktur perumahan dan fasilitas umum. Belanja Daerah yang difokuskan untuk sektor perumahan dan fungsi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berbasis ekonomi seperti sarana transportasi, jalan, terminal, pasar dan gudang. Maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan menaikkan pendapatan daerah yang nantinya akan membantu meningkatkan kemandirian daerah.

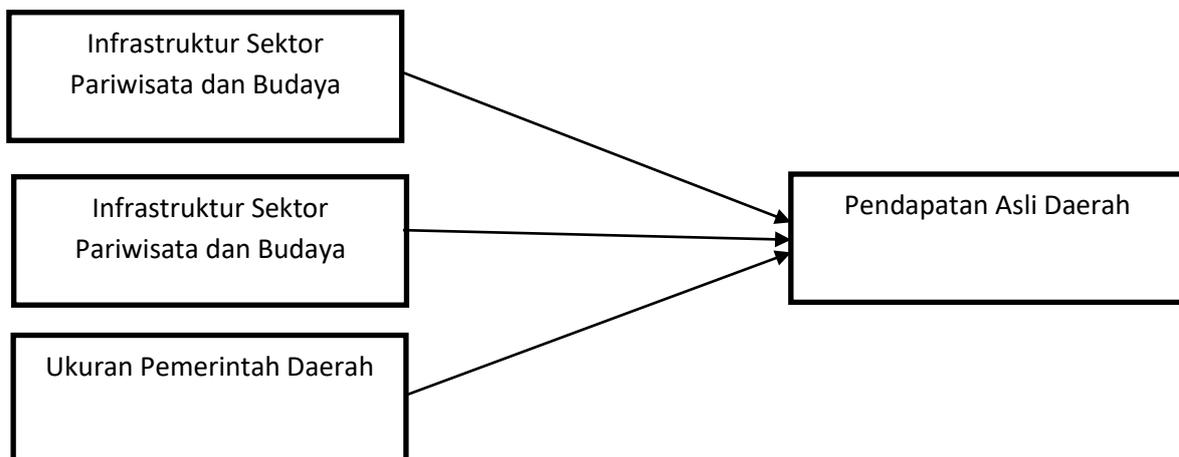
H2 : Infrastruktur sektor perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin besar peluang untuk pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan serta roda pemerintahan akan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta roda pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan lancar.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Menurut Siburian et al (2021), Ukuran pemerintah daerah merupakan indikator kebesaran kekuasaan pemerintah daerah yang dapat diukur berdasarkan aset/pegawai/produktivitas. Aset pemerintah daerah dinilai mampu menjadi fasilitas yang memiliki nilai tambah dalam meningkatkan daya utilitas pelayanan publik.

H3 : Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Gambar 2
Kerangka Penelitian



METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, dan situs internet terkait PAD, Neraca, dan Belanja Fungsi sektor pariwisata dan budaya serta sektor perumahan dan fasilitas umum di 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Maluku. Metode analisis menggunakan model regresi data panel, yaitu analisis yang menggabungkan data time series data dengan cross section. Analisa data panel dalam penelitian ini bertujuan mengukur adanya pengaruh variabel independent yaitu Infrastruktur Sektor Pariwisata dan Budaya (X1), Infrastruktur Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum (X2), terhadap variabel dependent yaitu Kemandirian Daerah (Y) berdasarkan data yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017 samapai tahun 2022.

Infrastruktur sektor Pariwisata dan Budaya (X1) mengacu pada seberapa besar alokasi Belanja Fungsi untuk Pariwisata dan Budaya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Proksi sektor pariwisata dan budaya mengikuti Hamzah & Setiawan (2019), M. Harefa (2020) Sunandar, Jannah, & Raya (2023). Infrastruktur Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum (X2) mengacu pada seberapa besar alokasi Belanja Fungsi untuk Perumahan dan Fasilitas Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Proksi sektor Perumahan dan Fasilitas Umum mengikuti Aprillia & Amar (2023). Ukuran pemerintah daerah mengacu pada seberapa besar total asset yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Proksi ini mengikuti Rofiq & Arza,2021. Kemandirian Daerah (Y) mengacu pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Menurut Iqbal Alamsyah, dkk (2022) terdapat tiga pendekatann yang digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel. Perbedaan yang mendasari pendekatan ini yaitu keberadaan efek spesifik individu. Selanjutnya peneliti merumuskan persamaan penelitian sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0i + \beta_1 PBit + \beta_2 PFUit + \beta_3 UPit + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

PB = Sektor Pariwisata dan Budaya

PFU = Sektor Perumahan dan Fasilitas Umum

UP = Ukuran Pemerintahan

β_0i = Konstanta/intercept ke-1

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel X

ϵ = Tingkat kesalahan (standard error)

i = Jumlah jenis kabupaten/kota

t = Jumlah periode waktu

HASIL

Tabel 2 statistik deskriptif untuk nilai standar devisiasi yang lebih kecil dari nilai mean bersifat homogen dan nilai standar devisiasi yang lebih besar dari nilai mean bersifat heterogen.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	PB	PFU	UP	Kemandirian Daerah
Mean	0.015260	0.113369	27.53468	0.048978
Median	0.006981	0.119042	28.08707	0.041315
Maximum	0.089649	0.254724	28.68256	0.160939
Minimum	0.000331	0.012111	0.018255	0.020041
Std. Dev	0.022498	0.062743	3.508859	0.029890

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Selanjutnya, uji pemelihan model dilakukan untuk menentukan model pengujian yang tepat untuk pengujian regresi data panel. Hasil uji pemelihan model dapat diringkask sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	71.078054	(10,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	179.673247	10	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan hasil uji *Chow* ini, model yang terbaik adalah model *Fixed Effect Model (FEM)*.

Setelah dilakukan pemilihan model, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasi yang digunakan adalah multikolinieritas dan heterokedastisitas (Napitupulu et al, 2021:120). Hasil uji multikolinieritas dan heterokedastisitas disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut:

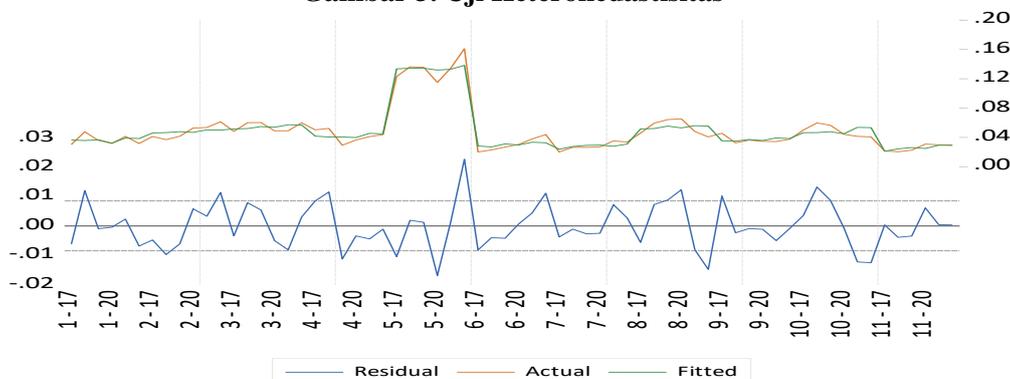
Tabel 4. Uji Multikolinieritas

	PB	PFU	UP
PB	1.000000	0.209103	-0.007744
PFU	0.209103	1.000000	-0.138785
UP	-0.007744	-0.138785	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas.

Gambar 3. Uji Heterokedastisitas



Sumber: Output Eviews 12, data diolah

Dari grafik menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Hasil pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.051466	0.009808	5.247191	0.0000
PB	0.021998	0.049258	0.446587	0.6570
PFU	-0.039402	0.018910	-2.083681	0.0421
UKURAN_PEMDA	5.97E-05	0.000332	0.179562	0.8582
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.007559	R-squared	0.935056
Mean dependent var	0.048978	Adjusted R-squared	0.918820
S.D. dependent var	0.029890	S.E. of regression	0.008516
Akaike info criterion	-6.507858	Sum squared resid	0.003771
Schwarz criterion	-6.043386	Log likelihood	228.7593
Hannan-Quinn criter.	-6.324323	F-statistic	57.59129
Durbin-Watson stat	1.452634	Prob(F-statistic)	0.000000
Root MSE	0.007559	R-squared	0.935056
Mean dependent var	0.048978	Adjusted R-squared	0.918820

Sumber: Output Eviews 12, data diolah

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah di Maluku sebesar 0.48 %. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam pengelolaan sektor pariwisata dan budaya masih tergolong rendah yaitu secara rata-rata sebesar 0.15%. Begitu juga dengan sektor Perumahan dan Fasilitas Umum pun tergolong rendah yaitu 0.11%.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa sektor pariwisata dan budaya tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa kemandirian daerah tidak terkait dengan sektor pariwisata dan budaya yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Apabila dilihat dari teori *stakeholder*, tidak adanya pengaruh sektor pariwisata untuk kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum meletakkan perhatian terhadap infrastruktur pada sektor pariwisata dan budaya. Pemerintah belum dapat memanfaatkan objek-objek wisata dan kebudayaan masing-masing daerah kabupaten/kota dengan baik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sektor perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan demikian, semakin semakin dikelola dengan baik sektor perumahan dan fasilitas umum maka akan meningkatkan kemandirian daerah di tiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Hal ini juga mendukung teori *stakeholder*, pemerintah untuk mencapai tujuan kemandirian daerah maka pemerintah perlu memperhatikan dan bertanggung jawab bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah kabupaten/kota.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan membangun tempat tinggal yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan, ketersediaan akses transportasi yaitu jalan dan terminal, pasar, serta fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menaikkan kemandirian daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan aset di masing-masing daerah di kabupaten/kota belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang diperoleh daerah dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan teori *stakeholder*, jika pemerintah daerah memiliki ukuran pemerintahan yang besar maka akan memberikan kemudahan dalam kegiatan bisnis sehingga akan memudahkan dalam memberikan layanan masyarakat. Jadi, jika pengelolaan aset pemerintah daerah yang tinggi akan meningkatkan kemandirian daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor perumahan dan fasilitas umum dapat meningkatkan kemandirian daerah. Upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan membangun tempat tinggal yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan, ketersediaan akses transportasi yaitu jalan dan terminal, pasar, serta fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menaikkan kemandirian

daerah. Sementara, sektor pariwisata dan budaya, dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Saran untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk jangka waktu penelitian yang lebih panjang dan diharapkan dapat meneliti secara langsung dari setiap daerah agar lebih memperluas informasi terkait infrastruktur sektor pariwisata dan budaya juga sektor perumahan dan fasilitas umum yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan penelitian dan pengembangan inovasi untuk sumber-sumber pendapatan daerah sehingga seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memahami dengan jelas pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.

REFERENSI

BPS Provinsi Maluku (2023). Statistik Keuangan Daerah Provinsi Maluku 2022

BPS Provinsi Maluku (2023). Provinsi Maluku Dalam Angka 2022

Agesti, D. W. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian dan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. *Journal of Economic Research and Policy Studies*, 1(1), 1-11.

Anggreini, D.A.B., Riska, O., Silvia, S., Maya, P. (2022). Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 2(1), 150-155.

Apri, P.A., & Syafri (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal Info Artha*, 6(2), 159-166.

Aprilian, W., & Syamsul, A. (2023) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1) , 29-36.

Asep, A.S., Mukhlisotul, J., Fitri, R. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2021. *Jurnal Bisnis Manajemen*, 1(2), 351-364.

Asima, S., Tuahman, S., Sarintan, E. D., Pinondang, N. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian dan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 5(2), 79-89.

Astuti, Wike (2023). Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Industri, dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Pada Tahun 2015-2022. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-69.

Bawono, A., & Shina A.F.I., (2018). Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Eviews. *LP2M IAIN SII*

Deby, L.D., Lucia, R.I., Yustirania, S. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *Journal of Economi*, 2(3), 647-658.

Fiqih, U.Z (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi islam periode 2010-2017. *Journal of Economi*, 2(3), 647-658.

Ika, K. & Meity, B. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan 2014 -2017. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 35-45.

Imam, R.H., & Dedy, S. (2019). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan 2014 -2017. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(10), 47-60.

Inul, R & Fefri, I.A. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai, dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(3), 705-719

Mandala, H (2020). Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 11(1), 65-77.

Martin, T.S., Muhammad, A.A., Amrie, F. (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1-26.

Ni Wayan, D.M.K.D & Made Heny, U.D (2021). Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10(1), 334-360.

Olivia, C. (2020). Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi*. 1-56.

Rizky, E.P (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi*. 13(2), 131-141.

Violina, A., Try, M., Rina, R., & Eurico (2021). Pengaruh Sektor Transportasi dan Komunikasi terhadap PDRB di Kota DKI Jakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(5), 846-851.

Anisa, I., (2022, 16 Desember). *Kemendagri Sebut 20 Daerah yang “Mandiri”, Ada Kabupaten Meranti?*. Diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6465184/kemendagri-sebut-baru-20-daerah-yang-mandiri-ada-kabupaten-meranti> tanggal 19 Januari 2024 pukul 19.30 WIB

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. *APBD, Realisasi APBD Setelah TA 2006*. Diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> tanggal 27 November 2023 pukul 01.13 WIB

BPK RI. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Laporan hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Diakses di https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf tanggal 19 Januari 2024 pukul 19.30 WIB

Indonesia, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta